

Pembiayaan Dan Penilaian Pendidikan Dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Di Indonesia

Yusran Lubis¹, Yahya², Hadiyanto³

¹ Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat

^{2,3} Universitas Negeri Padang

Corresponding Author: ✉ yusranlubis014@gmail.com

ABSTRACT

Proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa adanya biaya, biaya pendidikan adalah segala pengeluaran, baik berupa uang maupun tidak, sebagai wujud tanggung jawab semua pihak terhadap pembangunan pendidikan. Melalui pendidikan akan lahir generasi yang berkualitas dan unggul, sehingga pendidikan menjadi faktor penting untuk mewujudkannya. Dana pendidikan diperlukan untuk program sekolah, gaji guru, gaji pegawai dan kebutuhan lainnya yang dapat menunjang pencapaian visi dan misi. Kemudian penilaian program pembelajaran juga perlu dilakukan dengan baik, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana program pembelajaran berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan.

Keywords *Pembiayaan, Penilaian, Kualitas dari Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Setiap orang membutuhkan pendidikan, pendidikan meliputi tiga sumber, yaitu: keluarga, masyarakat dan sekolah. Pendidikan yang berkualitas memegang peranan penting dalam pembangunan suatu bangsa, karena melalui pendidikan yang berkualitas dapat melahirkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Indonesia juga merupakan negara berkembang, dimana permasalahan saat ini adalah tingginya biaya pendidikan. Sehingga akibatnya biaya pendidikan yang tinggi tidak terjangkau oleh masyarakat kelas bawah. Sekolah tentunya akan membebankan biaya yang paling tinggi untuk meningkatkan dan menjaga mutu pendidikan, seringkali dikatakan oleh sebagian orang bahwa pendidikan yang bermutu itu mahal. Akibatnya, akses masyarakat miskin untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatas dan masyarakat akan semakin terbelah berdasarkan status sosial.

Padahal hal tersebut telah diatur dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kepentingannya dan bakat tanpa membedakan status

sosial, ras, suku, agama dan gender. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan menjadikan warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup sehingga mendorong terwujudnya pembangunan manusia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila (Suroto, 2014).

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Penggunaan anggaran pendidikan yang efektif dan efisien diharapkan dapat menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Pemerintah dalam hal ini berperan penting bagi terciptanya kondisi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang demokratis. Salah satu kunci keberhasilan pembangunan pendidikan terletak pada kemampuan mengelola dana. Biaya pendidikan ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain: ukuran lembaga pendidikan, jumlah siswa, tingkat gaji guru dan kualifikasi guru, tingkat pertumbuhan penduduk (terutama di negara berkembang), perubahan kebijakan pendapatan. Pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut sumber dana, tetapi juga efisiensi penggunaan dana (Monita, DF 2019).

Peningkatan mutu pendidikan dipengaruhi oleh banyak faktor, faktor utamanya adalah guru yang merupakan penentu keberhasilan pembelajaran. Untuk mencapai hasil belajar yang optimal, diperlukan guru yang kreatif dan inovatif yang memiliki keinginan besar untuk terus menerus memperbaiki dan meningkatkan mutu pembelajaran terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Maka dalam pembelajaran dibutuhkan guru yang tidak hanya mampu mengajar dengan baik, tetapi guru juga dapat mengelola kelas dengan baik. Untuk menilai efektivitas program pembelajaran terhadap peningkatan mutu pendidikan yang telah dilaksanakan, maka perlu dilakukan evaluasi atau penilaian program pembelajaran dalam waktu yang ditentukan.

Sistem penilaian (assessment) yang dilakukan oleh guru, setiap penilaian didasarkan pada dua elemen dasar yang saling berkaitan, yaitu: Penyelenggaraan lembaga pendidikan tentunya membutuhkan dana terutama pada lembaga pendidikan yang berkualitas, (Rahmatullah, AS, dkk., 2022) agar lebih kredibel dan akuntabel dalam hal pembiayaan dan penilaian biaya pendidikan, yang keduanya harus berbasis internet. online), Syahrani, S. 2021) sekolah yang pendanaan bahkan penilaiannya selalu berbasis internet (Syahrani, S. 2022) dinilai lebih maju dari sisi manajemen (Syahrani, S. 2022) karena organisasi dengan model ini terlihat lebih siap menghadapi perkembangan zaman (Syahrani, S. 2022) dan dianggap siap bersaing dengan dunia luar, (Shaleha, Radhia, dan Auladina Salihah, 2021) karena terbiasa dan adaptif dengan teknologi informasi yang terus berkembang, (Syahrani, S. 2018) apalagi dalam Al Quran sebenarnya banyak sekali ayat yang membicarakan hal

ini, agar Islam tidak ketinggalan (Syahrani, S. 2019) tentunya banyak strategi yang harus dilakukan agar dapat menguasai teknologi terkini dalam hal mengembangkan organisasi sekolah, (Chollisni, A., dkk., 2022) sehebat apapun sebuah sekolah, tanpa menyesuaikan dengan perkembangan zaman tetap saja terasa ada yang kurang (Syahrani dkk, 2020) apalagi sekarang banyak sekolah yang berkualitas dan maju. teknologi (Syahrani, 2018). promosi sekolah, (Syahrani, 2017) diharapkan jalannya sekolah akan lebih ideal sesuai impian, (Syahrani, 2017) meskipun masih banyak kekurangan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian atau pengumpulan data kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian alamiah dan data yang dihasilkan bersifat deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembiayaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Dalam UUD 1945 Pasal 31 "Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan". Hal ini membuktikan adanya pemerataan pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia (Ferdin, WP 2013). Faktanya, tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah mahalnya biaya pendidikan. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung dapat mendukung efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Menurut Supriyono, biaya adalah pengorbanan ekonomi yang dilakukan untuk memperoleh barang atau jasa (Riski, A. 2019). Secara bahasa, biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran. Sedangkan dalam istilah ekonomi, biaya adalah pengeluaran yang dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Menurut Levin, pembiayaan pendidikan adalah suatu proses dimana pendapatan dan sumber daya yang tersedia digunakan untuk menyelenggarakan dan menyelenggarakan sekolah di berbagai daerah dengan tingkat pendidikan yang berbeda. Menurut Nanang Fattah, biaya pendidikan adalah sejumlah uang yang dihasilkan dan dikeluarkan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang meliputi gaji guru, peningkatan profesionalisme peralatan,

pengadaan alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, manajemen pendidikan. kegiatan dan pengawasan pendidikan.

➤ **Dasar Hukum Pembiayaan Pendidikan**

Sauri menyatakan bahwa dasar hukum pembiayaan pendidikan adalah Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 11 Ayat 2: Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan dana untuk penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun (Sauri, S.2016). Kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak atas pendidikan dasar adalah: 1) Kewajiban memberikan pelayanan dan fasilitas serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 2) Kewajiban menjamin ketersediaan dana, bagi penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun. 3) Wajib menjamin terselenggaranya wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar minimal. 4) Kewajiban memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah.

Selanjutnya Pasal 12 ayat 1 berbunyi bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak atas beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya dan menerima biaya pendidikan bagi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. Setiap siswa wajib ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali siswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan diskriminasi bagi mereka yang kurang mampu untuk membayar semua kebutuhan sekolah. (Sujatmoko, E. 2016).

➤ **Jenis Biaya Langsung Dalam Pendidikan**

Menurut Anwar (1991), biaya langsung didefinisikan sebagai pengeluaran uang yang secara langsung membiayai penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Juga didefinisikan sebagai biaya yang langsung menyentuh aspek dan proses pendidikan. Contoh biaya untuk gaji guru dan biaya pengadaan sarana belajar. Biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar siswa berupa pembelian alat-alat belajar, sarana belajar, biaya transportasi dan gaji guru. Baik yang dikeluarkan oleh

Pemerintah, orang tua, maupun siswa itu sendiri. Berikut jenis biaya yang merupakan bagian dari biaya langsung, yaitu: Biaya berulang.

Biaya berulang adalah biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional pendidikan selama satu tahun anggaran. Biaya tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan program pengajaran, pembiayaan gaji guru, tenaga sekolah, administrasi perkantoran, pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana. Hallak (1985) menjelaskan beberapa komponen pembiayaan dalam pendidikan, komponen yang dimaksud adalah: (Nirwana, IB (2019), Peningkatan pengembangan kegiatan siswa, Pembinaan tenaga kependidikan, Pembinaan Siswa, Rumah tangga sekolah, Pengadaan alat pembelajaran, Kesejahteraan, Pengadaan materi pembelajaran, pemeliharaan, fasilitas kelas, fasilitas sekolah, pemeliharaan dan penggantian sarana dan prasarana pendidikan, biaya pembinaan, pemantauan, pemantauan dan pelaporan, peningkatan mutu pada semua jenis jenjang Pendidikan.

➤ **Biaya Tidak Langsung Dalam Pendidikan**

Biaya yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan yang terjadi di sekolah. Biaya tidak langsung memiliki beberapa jenis, antara lain: 1) Biaya pribadi: Biaya sekolah yang ditanggung oleh keluarga atau perorangan. 2) Biaya masyarakat (social cost): Biaya sekolah ditanggung oleh masyarakat.

➤ **Bentuk Biaya Moneter dalam Pendidikan**

Segala bentuk pengeluaran berupa uang baik langsung maupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan.

➤ **Bentuk Biaya Non-Moneter dalam Pendidikan**

bentuk pengeluaran yang tidak berbentuk uang, meskipun dapat dinilai dalam bentuk uang, baik langsung maupun tidak langsung, yang dikeluarkan untuk kegiatan pendidikan. Misalnya: Materi, waktu, tenaga, dan lain-lain.

➤ **Hubungan Biaya dalam Peningkatan**

Kualitas Pendidikan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peningkatan berasal dari kata dasar tingkatan yang berarti tinggi rendahnya martabat kedudukan, kedudukan, kemajuan, peradaban dan sebagainya (Pusat Bahasa Depdiknas, 2001). Peningkatan mutu pendidikan tidak lepas dari pengaruh biaya pendidikan, tanpa adanya biaya maka mutu dan mutu akan rendah. Pada umumnya di tingkat sekolah akan menerapkan anggaran pendidikan yang tinggi untuk meningkatkan mutu dan mutu pendidikan.

Pendidikan yang berkualitas adalah pendidikan yang dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dasar untuk belajar, sehingga dapat mengikuti bahkan menjadi pionir dalam pembaharuan dan perubahan dengan memberdayakan secara optimal sumber daya pendidikan melalui pembelajaran yang baik dan kondusif.

Biaya pendidikan memiliki hubungan yang signifikan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Tanpa adanya biaya, mutu pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan menggunakan berbagai sumber pendanaan, sekolah diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Penilaian Pendidikan

Untuk mencapai kualitas pembelajaran yang baik, diperlukan sistem penilaian yang baik pula. Agar penilaian dapat berfungsi dengan baik, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka sangat perlu ditetapkan suatu standar penilaian yang akan menjadi dasar dan acuan bagi guru dalam melakukan kegiatan penilaian. Penilaian diartikan sebagai penerapan berbagai metode dan penggunaan berbagai alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana belajar siswa hasil atau kompetensi siswa (rangkaiannya kemampuan) yang dicapai. Penilaian menjawab pertanyaan tentang seberapa baik hasil atau prestasi belajar seorang siswa.

Dalam menilai siswa, guru harus memiliki standar kompetensi penilaian, yaitu: 1) Guru harus terampil dalam memilih metode penilaian yang tepat untuk pengambilan keputusan instruksional (pengajaran). 2) Guru harus terampil dalam mengembangkan metode penilaian yang tepat untuk pengambilan keputusan instruksional. 3) Guru harus terampil dalam administrasi, menentukan kriteria penilaian dan menginterpretasikan hasil dari metode penilaian yang dibuat. 4) Guru harus terampil menggunakan hasil penilaian ketika membuat keputusan tentang prestasi individu siswa, merencanakan pengajaran, mengembangkan kurikulum dan meningkatkan kualitas sekolah. Pencapaian kompetensi siswa pada setiap satuan pendidikan ditetapkan dengan Kriteria Ketuntasan Minimal, yang selanjutnya disebut KKM. KKM mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran dan kondisi satuan pendidikan.

Tujuan penilaian bukan untuk membuktikan, tetapi untuk memperbaiki. Penilaian pendidikan adalah suatu proses penentuan nilai atau keputusan dalam bidang pendidikan atau segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bidang pendidikan. Penetapan keputusan didahului dengan kegiatan pengumpulan data atau informasi, sehingga seorang pemimpin dapat merumuskan suatu kebijakan terhadap program-program yang sedang

dikembangkan atau dilaksanakan (Dahri, M., Ramadani, W., & Arsyam, M. 2021). Informasi semacam ini akan diperoleh melalui penilaian. Penilaian sebagai kegiatan pemeriksaan yang diarahkan untuk membantu perbaikan program.

➤ **Fungsi Penilaian Pendidikan**

Setiap kegiatan tentunya memiliki fungsi yang bermanfaat bagi kemajuan dan pengembangan potensi manusia, termasuk kegiatan pendidikan (Dariyo, A. tth). Dengan penilaian juga akan diperoleh gambaran tentang suatu proses kegiatan pendidikan. Fungsi penilaian pada akhir satuan pelajaran ditekankan pada perbaikan proses belajar mengajar, sedangkan fungsi penilaian dalam proses pembelajaran adalah sebagai berikut: 1) Sebagai bahan diagnosis dan pengembangan hasil penilaian. Hal ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mendiagnosis kelemahan dan kelebihan siswa, serta hambatan yang menyertainya. Hasil ini juga dapat dijadikan bahan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran. 2) Sebagai bahan seleksi dari hasil penilaian. Dapat digunakan sebagai dasar untuk memilih penempatan siswa, karena siswa akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu melanjutkan jenjang pendidikan atau berhenti bekerja. 3) Sebagai bahan pertimbangan untuk kenaikan kelas. Dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah siswa yang bersangkutan dapat naik kelas atau tidak. 4) Sebagai bahan pertimbangan penempatan hasil penilai. Dapat digunakan sebagai dasar pemilihan penempatan siswa berdasarkan kemampuannya.

➤ **Peningkatan Kualitas Melalui Proses Pembelajaran**

Pendidikan yang berkualitas mengacu pada berbagai input seperti tenaga pengajar, peralatan, buku, biaya kuliah, teknologi dan lain-lain (Sukmawati, S. Sukmawati, tth). Ada yang mengaitkan kualitas proses pembelajaran dengan argumentasi bahwa proses pendidikan dalam pembelajaran merupakan penentu kualitas yang paling utama. Jika kualitas ingin dicapai, proses harus diperhatikan dan menjadi fokus perhatian. Salah satu hasil yang diharapkan dari pelaksanaan penilaian proses belajar mengajar adalah memperoleh informasi tentang bagian-bagian yang telah dicapai dan yang belum dicapai dari kegiatan pembelajaran tersebut. Adanya penilaian terhadap proses belajar mengajar memberikan dasar bagi kegiatan perbaikan yang berkelanjutan, hal ini sesuai dengan indikator mutu (continuous improvement) (Budiutomo, TW 2015).

Ada sepuluh langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan, yaitu: (Waruwu, H. 2008) 1) Mengembangkan kesadaran akan perlunya peningkatan kualitas dan peluang untuk itu. 2) Tentukan tujuan

peningkatan kualitas. 3) Menyusun langkah-langkah untuk mencapai sasaran peningkatan mutu yang telah ditentukan. 4) Mempersiapkan pelatihan. 5) Melaksanakan program peningkatan mutu yang direncanakan. 6) Membuat laporan kemajuan. 7) Memberikan penghargaan. 8) Mengumumkan hasil yang dicapai. 9) Melacak kesuksesan. 10) Memupuk kualitas dan peningkatan kualitas dengan menjadikannya bagian dari sistem.

KESIMPULAN

Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, pembiayaan dan penilaian sangat penting untuk meningkatkan mutu sekolah. Pembiayaan pendidikan tidak lepas dari pelaksanaan proses belajar mengajar di sekolah. Tanpa adanya biaya, mutu pendidikan tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam rangka pembentukan sumber daya manusia (SDM), penggunaan anggaran atau pembiayaan pendidikan yang efektif dan efisien dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Proses pembelajaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting, oleh karena itu guru harus mampu mengelola kelas dengan baik. Hal ini agar pembelajaran dapat berjalan dengan optimal. Dalam konteks inilah perlu dilakukan penilaian program, agar guru dapat melihat sejauh mana program telah tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiutomo, TW (2015). Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Penilaian Proses Belajar Mengajar. *Jurnal Akademi Pendidikan*, 6(1).
- Chollisni, A., Syahrani, S., Dewi, S., Utama, AS, & Anas, M. (2022). Konsep kreatif Penguatan Pembangunan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 di Indonesia: Kajian Strategi dan Manajemen Kebijakan Publik. *Tinjauan Linguistik dan Budaya*, 6, 413-426.
- Dahri, M., Ramadani, W., & Arsyam, M. (2021). Administrasi Evaluasi Dan Penilaian Dalam Pendidikan. Dariyo, A. Peran Evaluasi Pendidikan Untuk Pengembangan Kualitas Pendidikan Di Perguruan Tinggi.
- Ferdi, WP (2013). Pembiayaan pendidikan: Suatu kajian teoritis. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Monita, DF (2019). Pembiayaan dalam pendidikan.
- Nirwana, IB (2019). Biaya Pendidikan Dan Sumber Dana Atau Biaya Pendidikan. Pusat Bahasa
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

- Rahmatullah, AS, Mulyasa, E., Syahrani, S., Pongpalilu, F., & Putri, RE (2022). era digital 4.0: Kontribusi terhadap pendidikan dan psikologi mahasiswa. *Tinjauan Linguistik dan Budaya*, 6, 89-107.
- Riski, A. (2019). *Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Di Indonesia*.
- Sauri, S. (2016). *Strategi Pembangunan Bidang Pendidikan Untuk Mewujudkan Pendidikan Bermutu*. Bandung: UPI.
- Shaleha, Radhia, dan Auladina Shalihah. "Analisis Kesiapan Siswa Filial Dambung Raya Dalam Mengikuti Analisis Nasional Berbasis Komputer di SMAN 1 Bintang Ara Kabupaten Tabalong." *Joel: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa*, tidak. 3 (2021): 221-234.
- Sujatmoko, E. (2016). Hak warga negara dalam memperoleh pendidikan. *Jurnal Konstitusi*, 7(1).
- Sukmawati, S. Sukmawati: Strategi peningkatan Mutu Pendidikan melalui Manajemen Sekolah Berbasis. *Jurnal Cakrawala Kependidikan*, 9(2), 218536.
- Suroto. (2014) *Kebijakan Pembangunan Pendidikan Nasional Indonesia Dan Kendala Yang dihadapi sebagai upaya perbaikan dalam rangka mempersiapkan warga negara muda yang baik dan cerdas*.
- Syarani dkk, *Guru Masa Kini*, Amuntai: STIQ Amuntai Press, 2020.
- Syahrani, *Efulgensi Kemandirian Desa*, Bandung: Jatidiri, 2017.
- Syarani, *Bukti Dalam Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Ponorogo: Myria Penerbit, 2018.
- Syarani, *Humanisasi Dalam Administrasi dan Manajemen Pendidikan*, Yogyakarta: Global Pers, 2017.
- Syahrani, *Idealisme Manajemen Pendidikan*, Bandung: Asrifa, 2017.
- Syahrani, S. (2018). Manajemen Kelas yang Humanis. *Al-risalah*, 14(1), 57-74.
- Syahrani, S. (2019). Manajemen Pendidikan Dengan Sastra Al-Qur'an. *Darul Ulum: Jurnal Ilmiah Keagamaan, Pendidikan dan Kemasyarakatan*, 191-203.
- Syahrani, S. (2021). Misi Digitalisasi Pendidikan Anwaha. *Jurnal Indonesia Pendidikan (INJOE)*, 1(1), 26-35.
- Syahrani, S. (2022). Kesiapan Santri Dalam Mengikuti Analisis Nasional PKPPS Anwarul Hasaniyyah (Anwaha) Kabupaten Tabalong. *Adiba: Jurnal Pendidikan*, 2(1), 23-31.
- Syahrani, S. (2022). Model Kelas Anwaha Manajemen Pembelajaran Tatap Muka Masa Covid 19. *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6(1), 38-47.
- Syahrani, S. (2022). Peran Wali Kelas Dalam Pembinaan Disiplin Belajar di Pondok Pesantren Anwarul. *Hasaniyyah (Anwaha) Kabupaten*

Tabalong. *AlQalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(1), 50-59.

Waruwu, H. (2008). Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan. *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Humaniora, Sains, dan Pembelajarannya*, 2(2).